

PROSIDING

SEMINAR NASIONAL SASINDO UNPAM

VOLUME 4 NO. 2, DESEMBER 2024

KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA: STUDI KASUS PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2019

Fina Puspirasari Prabarahayu¹, Siti Afriyanti²

Sariifinapuspita@gmail.com¹, afriyanti392@gmail.com²

Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Sastra
Universitas Pamulang, Tangerang Selatan. Jl. Raya Puspitek, Buaran
Kota Tangerang Selatan, Banten

Diterima: 18 Desember 2024

Direvisi: 16 Januari 2025

Disetujui: 18 Januari 2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan publik dalam pemilihan umum dan bagaimana kebijakan tersebut mempengaruhi hasil pemilihan. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis konten dan wawancara dengan narasumber yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan publik dalam pemilihan umum di Indonesia dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti ideologi politik, kepentingan kelompok, dan strategi kampanye. Kebijakan tersebut juga mempengaruhi hasil pemilihan dengan cara mempengaruhi preferensi pemilih.

Kata Kunci: Demokrasi, Pemilu, Politik

ABSTRACT

This study aims to identify the factors influencing public policy in general elections and how these policies affect the election outcomes. The research method used is content analysis and interviews with relevant informants. The results indicate that public policy in Indonesia's general elections is influenced by factors such as political ideology, group interests, and campaign strategies. These policies also affect election outcomes by influencing voter preferences.

Keywords: Democracy, General Election, Politics

PENDAHULUAN

Pemilihan umum (Pemilu) adalah pilar penting dalam sistem demokrasi Indonesia yang bertujuan untuk memilih pemimpin negara, legislatif, dan eksekutif yang akan membawa arah kebijakan nasional. Sebagai negara dengan sistem demokrasi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia menjalankan pemilu secara langsung, bebas, dan adil, yang memberikan ruang bagi rakyat untuk memilih pemimpin mereka. Pemilihan Presiden (Pilpres) adalah salah satu elemen yang paling dinamis dalam Pemilu Indonesia karena berhubungan langsung dengan nasib bangsa dalam periode lima tahun. Setiap pemilihan

umum, terutama Pilpres, selalu diwarnai dengan berbagai kebijakan yang ditawarkan oleh masing-masing calon yang bertujuan untuk menarik perhatian pemilih.

Pemilihan Presiden Indonesia 2019, yang mempertemukan dua pasangan calon yaitu Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, menunjukkan bagaimana kebijakan publik dapat mempengaruhi dinamika pemilu. Masing-masing pasangan mengusung platform yang sangat berbeda, yang mencerminkan ideologi politik mereka serta respons terhadap berbagai masalah sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia. Kebijakan yang diajukan tidak hanya berbicara tentang program-program jangka pendek, tetapi juga menggambarkan visi calon terhadap masa depan negara. Hal ini menjadikan pemilihan presiden 2019 sangat menarik untuk dianalisis, terutama terkait dengan bagaimana kebijakan publik tersebut diterima oleh pemilih.

Kebijakan publik dalam konteks pemilihan umum merupakan salah satu faktor utama yang dapat memengaruhi preferensi pemilih. Kebijakan tersebut sering kali dirancang untuk mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta menjawab permasalahan yang tengah dihadapi oleh negara. Di Indonesia, pemilihan presiden seringkali menjadi ajang adu kebijakan antara dua pasangan calon yang berusaha meyakinkan rakyat bahwa mereka adalah yang terbaik untuk memimpin negara. Oleh karena itu, kebijakan publik yang diusung dalam kampanye menjadi krusial dalam menentukan siapa yang akan terpilih menjadi Presiden.

Namun, kebijakan publik dalam Pemilu tidak hanya berhubungan dengan janji-janji calon, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, seperti dinamika politik yang ada, kepentingan kelompok, serta strategi kampanye yang diterapkan. Dalam konteks Pemilu 2019, misalnya, faktor ideologi politik yang mengemuka antara kedua calon sangat berpengaruh terhadap pilihan kebijakan yang diusung. Joko Widodo, yang dikenal sebagai calon dengan ideologi yang lebih pro-pembangunan ekonomi, menawarkan kebijakan yang lebih berpihak pada pembangunan infrastruktur dan ekonomi pasar bebas. Sebaliknya, Prabowo Subianto dengan ideologi nasionalisme lebih menekankan pada kebijakan kedaulatan pangan, pemberdayaan sektor pertanian, serta pembenahan sektor-sektor ekonomi yang dianggap terabaikan.

Penting untuk menganalisis bagaimana kebijakan tersebut diterima oleh pemilih dan bagaimana kebijakan ini mempengaruhi preferensi mereka dalam memilih calon presiden. Seringkali, meskipun kebijakan yang diusung keduanya tampak menjanjikan, pemilih akan memilih berdasarkan seberapa jauh kebijakan tersebut relevan dengan

kebutuhan pribadi mereka atau dengan situasi sosial dan ekonomi yang mereka alami. Oleh karena itu, analisis terhadap kebijakan publik dalam Pemilu 2019 dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai dinamika politik yang terjadi di Indonesia dan bagaimana masyarakat merespons janji-janji yang diberikan oleh calon presiden.

Salah satu faktor yang turut mempengaruhi kebijakan yang diusung dalam Pemilu 2019 adalah kepentingan kelompok. Kepentingan kelompok ini tidak hanya terbatas pada partai politik yang mendukung calon tertentu, tetapi juga melibatkan kelompok-kelompok masyarakat dengan kebutuhan spesifik, seperti kelompok pekerja, pengusaha, petani, hingga kelompok masyarakat kelas menengah ke bawah yang rentan terhadap dampak kebijakan ekonomi. Dalam hal ini, kebijakan yang ditawarkan oleh calon presiden sering kali dipengaruhi oleh tekanan atau dukungan dari kelompok-kelompok tersebut, yang berusaha memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan akan menguntungkan mereka.

Strategi kampanye yang diterapkan oleh masing-masing pasangan calon juga memainkan peran yang sangat penting dalam penyampaian kebijakan kepada masyarakat. Pemilihan strategi kampanye yang tepat, baik melalui media sosial, debat publik, maupun pertemuan langsung dengan masyarakat, sangat mempengaruhi seberapa efektif kebijakan tersebut diterima dan dipahami oleh pemilih. Dalam hal ini, media massa memiliki peran yang signifikan dalam membentuk opini publik tentang kebijakan yang diajukan oleh calon presiden, yang pada gilirannya mempengaruhi preferensi pemilih.

Oleh karena itu, untuk memahami bagaimana kebijakan publik dalam Pemilu 2019 mempengaruhi hasil pemilu, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan yang ditawarkan oleh calon presiden dan bagaimana kebijakan tersebut mempengaruhi keputusan pemilih. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis konten dan wawancara mendalam untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai dinamika kebijakan dalam Pemilu 2019 dan dampaknya terhadap pemilih di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan dua teknik utama yaitu analisis konten. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali makna yang lebih dalam terkait kebijakan publik yang diusung dalam Pemilu

2019. Teknik analisis konten digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang terkandung dalam berbagai dokumen terkait kampanye dan kebijakan yang diusung oleh kedua pasangan calon. Sumber data yang dianalisis meliputi artikel-artikel surat kabar, laporan media, dan dokumen resmi yang mencatat kebijakan yang diajukan oleh masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden. Teknik ini bertujuan untuk memahami aspek-aspek kebijakan yang mereka soroti dan bagaimana kebijakan tersebut dikomunikasikan kepada publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis konten yang dilakukan terhadap berbagai artikel dan wawancara yang dilakukan dengan narasumber, hasil penelitian menunjukkan beberapa faktor utama yang mempengaruhi kebijakan publik dalam Pemilu 2019 di Indonesia:

Ideologi Politik

Setiap calon presiden memiliki ideologi politik yang berbeda. Misalnya, Joko Widodo mengusung kebijakan yang berfokus pada pembangunan infrastruktur, kemajuan ekonomi, dan penguatan posisi Indonesia di kancah internasional. Sementara itu, Prabowo Subianto lebih menekankan pada kedaulatan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta memperkuat sektor pertanian dan industri dalam negeri.

Kepentingan kelompok

Kepentingan kelompok memainkan peran besar dalam membentuk kebijakan yang diusung oleh masing-masing calon. Misalnya, kelompok pengusaha dan partai politik tertentu memberikan dukungan kepada calon presiden dengan harapan mendapatkan kebijakan yang menguntungkan sektor ekonomi mereka. Dukungan ini mempengaruhi bagaimana kebijakan tersebut dikembangkan dan disosialisasikan kepada publik.

Strategi Kampanye

Strategi kampanye yang digunakan oleh kedua calon presiden juga sangat mempengaruhi cara kebijakan dipresentasikan kepada pemilih. Media sosial, debat publik, dan kunjungan langsung ke daerah-daerah terpencil menjadi sarana penting dalam menarik perhatian pemilih. Pemberian program-program bantuan langsung, seperti program kartu sakti dan bantuan sosial, sangat populer di kalangan pemilih kelas bawah dan dianggap sebagai salah satu kebijakan yang efektif dalam memperoleh dukungan politik para calon, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor

eksternal, seperti tekanan dari kelompok-kelompok kepentingan dan dinamika politik yang terjadi selama masa kampanye. Selain itu, adanya upaya untuk menyampaikan kebijakan yang mudah diterima oleh berbagai kalangan pemilih menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan dalam pemilu.

Salah satu aspek penting yang dapat disoroti dari hasil penelitian ini adalah betapa kuatnya pengaruh kebijakan publik terhadap preferensi pemilih. Kebijakan yang menyentuh kehidupan sehari-hari pemilih, seperti bantuan sosial, subsidi, dan kebijakan pro-rakyat lainnya, cenderung lebih mudah diterima dan diterjemahkan ke dalam bentuk dukungan suara. Hal ini menunjukkan bahwa pemilih, meskipun terpengaruh oleh ideologi politik, lebih cenderung memilih calon yang menawarkan kebijakan yang dianggap langsung menguntungkan mereka.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan publik dalam Pemilu 2019 di Indonesia sangat dipengaruhi oleh ideologi politik masing-masing calon, kepentingan kelompok yang terlibat dalam proses pemilu, dan strategi kampanye yang diterapkan. Kebijakan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai platform yang ditawarkan calon, tetapi juga sebagai alat untuk memengaruhi preferensi pemilih. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih mendalam tentang kebijakan publik dalam pemilihan umum sangat penting untuk memahami dinamika politik di Indonesia. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan publik memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk hasil pemilu. Peneliti merekomendasikan agar studi lebih lanjut dilakukan untuk mengidentifikasi lebih banyak faktor yang dapat mempengaruhi kebijakan publik dan hasil pemilihan, serta dampaknya terhadap pemerintahan yang terpilih.

REFERENSI

- Budiardjo, M. (2018). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Effendy, O. U. (2019). *Pemilihan Umum dan Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sanit, A. (2020). *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Prabowo, D. (2020). *Politik Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*. Jakarta: Kencana.
- Widodo, J. (2021). *Kebijakan Pembangunan Nasional dan Tantangannya*. Jakarta: Penerbit Salemba.